

Dampak Etika Komunikasi Publik Terhadap Citra Positif Pemerintah Provinsi Maluku

Jimmy Purwata Mangasi Sirait¹ & Amelia Tahitu²

^{1,2} Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP UKIM

Correspondence: jimsirait@gmail.com

Abstract:

The Impact of Public Communication Ethics on the Positive Image of the Maluku Provincial Government. This research uses quantitative methods, with data collection using field observations, questionnaires/questions. The purpose of this study was to determine the Impact of Public Communication Ethics on the Image of the Maluku Provincial Government. Through a purposive sampling technique, it was found that a sample of 42 respondents was spread across Nusaniwe and Sirimau Districts. The results of this study obtained communication ethics as measured through indicators of messages conveyed, messages received, messages rejected, as well as the attitude, character and nature of the recipient of the message, showing a significant influence. Based on the coefficient of determination test, it shows that 40.1% of the influence of public communication ethics has on the positive image of the Maluku Provincial government, while the remaining 59.9% is influenced by indicators and or other variables. Variable Y, namely the positive image of the Maluku provincial government with indicators namely ideas, beliefs, impressions and objects, is influenced by variable X, so that the result, the hypothesis is accepted.

Keywords: *Ethics; Public Communication; Positive Image.*

Abstrak:

Dampak Etika Komunikasi Publik Terhadap Citra Positif Pemerintah Provinsi Maluku. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan pengumpulan data menggunakan observasi lapangan, kuesioner/angket. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui Dampak Etika Komunikasi Publik Terhadap Citra Pemerintah Provinsi Maluku. Melalui teknik purposive sampling didapati sampel berjumlah 42 responden yang tersebar di Kecamatan Nusaniwe dan Kecamatan Sirimau. Hasil dari penelitian ini didapat Etika komunikasi yang diukur melalui indikator pesan yang disampaikan, pesan yang diterima, pesan yang ditolak, serta sikap, watak dan sifat penerima pesan, menampakkan pengaruh yang signifikan. Berdasarkan uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa 40,1% pengaruh etika komunikasi publik terhadap citra positif pemerintah Provinsi Maluku, sedangkan selebihnya yaitu 59,9% dipengaruhi oleh indikator dan atau variabel lain. Variabel Y yaitu citra positif pemerintah provinsi Maluku dengan indikator yakni Ide/gagasan, keyakinan, kesan dan obyek, dipengaruhi oleh variabel X, sehingga hasilnya, hipotesa diterima.

Kata kunci: Etika; Komunikasi Publik; Citra Positif.

1. Pendahuluan

Etika komunikasi seseorang dapat menentukan pola dan bentuk komunikasi, hal ini terjadi karena pemimpin tersebut memiliki wewenang tersendiri. Para ahli etika komunikasi, seperti Nielsen dan Johannesen menyatakan bahwa sangatlah penting bagi para komunikator untuk mengintegrasikan masalah etika dalam semua aspek komunikasi yang dilakukan.

Apalagi berkaitan dengan komunikasi di ruang publik dimana publik tidak hanya mendengarkan konten pembicaraan namun juga memperhatikan gaya dan penampilan si pembicara. Para ahli filsafat awal seperti Aristoteles, Socrates, dan Plato juga menyatakan secara ekstensif pentingnya prinsip moralitas dan etika dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Aristoteles bahkan menegaskan bahwa seseorang yang memiliki 'ethos' atau kredibilitas tidak hanya mampu menyampaikan apa yang dirasakan dengan baik namun juga niat serta moral yang baik. Seorang pemimpin juga harus mampu untuk mendapatkan posisi komunikasi yang ia terapkan dengan sifat yang terbuka dan tidak ada yang disembunyikan atau ditutupi terkait perihal kerja dan target yang diinginkan, guna kepentingan dan kemajuan bersama. Alasan mengapa seorang pemimpin perlu memahami etika komunikasi publik, karena pemahaman komunikasi yang akan menjadi pedoman yang kuat bagi seorang pemimpin untuk membangun citra positif bagi masyarakat.

Citra adalah *a picture of mind*, yaitu gambaran yang ada di dalam benak seseorang (Holt, Rinehart and Winston dalam; Gassing dan Suryanto 2016: 156). Citra berkaitan dengan gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi atau produk. Citra adalah salah satu aset penting dari organisasi yang selayaknya terus-menerus dibangun dan dipelihara (Maria Mutiara Claudia Nada, Max R. Remban, Reiner R. Onsu 2017). Seorang pemimpin harus memiliki citra yang baik dalam dirinya. Biasanya citra itu berakar dari kepercayaan yang kongkretnya diberikan secara individual, dan merupakan pandangan atau persepsi serta terjadinya proses akumulasi dari kepercayaan yang telah diberikan oleh individu-individu tersebut akan mengalami suatu proses yang cepat atau lambat untuk membentuk opini publik yang lebih luas dan abstrak, yaitu sering dinamakan citra (*image*).

Pemerintah Provinsi Maluku sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat daerah, haruslah menjadi panutan dan contoh dalam komunikasi di ruang publik mendapatkan sorotan ditengah masyarakat hal ini karena gaya bicara yang tidak menampilkan wajah keteladanan yang baik dalam berkomunikasi. Tidak etis seorang pimpinan kepala daerah mengeluarkan kata-kata yang berujung makian dan kata-kata kasar ketika berada di ruang publik. Perilaku etika komunikasi publik kepemimpinan bisa kita lihat contohnya pada *cukimai* dan "*mai pung lubang p**i*" dilontarkan dari mulut seorang petinggi di tingkat daerah pada senin (21/12/20). Beliau mengucapkan kata kasar itu, karena tidak terimanya terkait informasi dugaan alokasi APBD Maluku sebesar Rp 5,1 miliar untuk merehabilitasi rumah dinas sementara Gubernur yang sekaligus adalah rumah kediamannya (<https://regional.kompas.com>).

Di hadapan publik, pemerintah Provinsi Maluku kembali mengeluarkan tanggapan kasar dan tidak etis atau tidak pantas keluar dari mulut seorang pejabat publik. Tanggapan ini di sampaikan beliau dalam sambutannya saat menyerahkan bantuan sosial beras dan sembako dari pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Maluku kepada masyarakat terdampak.

PPKM Mikro. Pemerintah Provinsi Maluku mengomentari aksi demo mahasiswa yang beberapa hari belakangan ini terjadi di Kota Ambon, sebagai bentuk penolakan PPKM Mikro yang berdampak pada ekonomi masyarakat kecil. Katanya, mereka-mereka yang terlibat dalam aksi demo tolak PPKM di Kota Ambon sehingga menimbulkan kerumunan, diikat saja dan dibuang ke laut. Pemerintah Provinsi Maluku bahkan sempat menyebut mereka yang demo dengan sebutan *Kaskadu* (jenis penyakit kulit). "Jangan terpengaruh oleh itu apa, kaskadu kaskadu (kurap) itu yang cuma berapa ekor, tapi selalu buat...,sekali-sekali masyarakat Maluku kompak, kumpul la pukul mereka sampai t*i keluar dari pantat," kata beliau dalam sambutannya di Paroki Katholik Maria Bintang Laut Senin, (26/7/2021). (<https://rri.co.id/ambon>).

Dilihat dari pernyataan di atas, etika komunikasi dari seorang pemimpin merupakan salah satu contoh dari pernyataan yang tidak etis apalagi Pemerintah Provinsi Maluku yang adalah publik figur yang seharusnya menjadi pola anutan bagi masyarakat. Namun dalam

pernyataan tersebut justru menimbulkan pemikiran yang negatif dari masyarakat tentang beliau. Dari latar belakang tersebut, maka tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Etika Komunikasi Publik dan Citra Positif Pemerintah Provinsi di Masyarakat.

2. Kerangka Dasar Teori

a. *Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana).*

Teori Perilaku Terencana merupakan pengembangan lebih lanjut dari Teori Perilaku Beralasan (*Theory of Reasoned Action*). Teori perilaku yang direncanakan adalah sebuah teori tentang hubungan antara keyakinan dan perilaku. Teori ini menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi pengendalian perilaku, bersama-sama membentuk niat perilaku individu dan perilaku.

b. *Model Komunikasi Aristoteles*

Model komunikasi Aristoteles adalah salah satu model komunikasi linear yang ditujukan untuk menggambarkan atau menjelaskan proses *public speaking*. Model ini merupakan model komunikasi pertama dan merupakan model komunikasi yang diterima secara luas diantara model komunikasi lainnya. Model komunikasi Aristoteles menitikberatkan pada pembicara (*speaker*) dan bicara (*speech*). Model ini memiliki lima elemen, yaitu *speaker*, *speech*, *occasion*, *audience*, dan *effect*.

- Pembicara (*speaker*) – orang yang berperan aktif dalam membentuk dan mengirimkan pesan kepada khalayak.
- Pesan verbal (*speech*) – pesan yang dibentuk dan disampaikan oleh speaker.
- Situasi (*occasion*) – situasi saat pesan disampaikan.
- Khalayak (*audience*) – orang yang menjadi target sasaran atau khalayak sasaran dalam proses komunikasi.
- Efek (*effect*) – dampak yang ditimbulkan dalam proses komunikasi.

c. *Hipotesis*

Dari kerangka teori yang dibangun di atas, maka hipotesis penelitian ini harus dibuktikan atau di uji kebenarannya (pengaruhnya). Adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Etika Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi Maluku dan Citra Positif di Masyarakat.
2. Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara Etika Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi Maluku terhadap Citra Positif di Masyarakat.

3. Metode

Tipe penelitian menurut Sugiyono (2010:13) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Ambon, tepatnya pada dua (2) kecamatan, yakni Kecamatan Nusaniwe dan Kecamatan Sirimau, dengan alasan bahwa, terjadi komunikasi publik oleh Pemerintah Provinsi Maluku dengan kelompok masyarakat yang memiliki citra negatif.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2010: 115). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 2 Kecamatan yang dipilih dari 5 Kecamatan di Kota Ambon, yakni; Kecamatan Nusaniwe dan Kecamatan Sirimau. Dengan alasan bahwa, terjadi komunikasi public oleh Pemerintah Provinsi Maluku dengan kelompok masyarakat yang memiliki citra negatif, di dua (2) kecamatan dimaksud, maka populasi seperti pada tabel berikut ini:

Populasi	Jumlah
Kecamatan Nusaniwe	167,592
Kecamatan Sirimau	98, 952
<i>Total</i>	<i>266.554</i>

Sampel adalah bagian dari populasi, sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini masyarakat Kota Ambon yang ditentukan berdasarkan teknik sampling random sampling dari 5 Kecamatan ditentukan 2 Kecamatan yakni Nusaniwe, dan Sirimau. Maka dalam menentukan jumlah sampel peneliti menggunakan rumus perhitungan besaran sampel dengan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

dimana :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e : Batas toleransi kesalahan atau pelanggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang di toleransi, yaitu: (0,10%).

Berdasarkan rumus di atas, maka dapat diketahui sampel yang akan diambil dalam penelitian ini melalui perhitungan berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{(1 + Ne^2)} \\ n &= \frac{266.554}{1 + 266.554 \cdot (10^2)} \\ n &= \frac{266.554}{(1 + 5.29)} \\ n &= \frac{266.554}{(6.29)} \\ n &= 42 \end{aligned}$$

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini yang menjadi sampel yakni sebanyak 42 responden, yang mewakili dua kecamatan yaitu Kecamatan Nusaniwe dan Kecamatan Sirimau.

4. Hasil Penelitian

a. Uji Simultan (F)

Uji F ini bertujuan untuk mengetahui secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil F-test ini dapat dilihat lengkapnya pada output SPSS pada tabel dibawah ini:

Tabel ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1 Regression	40.559	1	40.559	.582	.450 ^b
Residual	2789.941	40	69.749		
Total	2830.500	41			

a. Dependent Variabel: Citra Positif Pemerintah Provinsi Maluku

b. Predictors: (Constant), Etika Komunikasi Publik

Dalam ringkasan Tabel 4.3.4 hasil uji simultan (uji F), dihasilkan F-hitung 40.582 > F-tabel 4.0847, artinya signifikan (df1 = 2 – 1 = 1 dan df2 = 42 – 2 = 40). Signifikan disini berarti hipotesis diterima yang berbunyi “Dampak Etika Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi Maluku Terhadap Citra Positif *diterima*”.

b. Uji Parsial (t)

Uji t ini bertujuan untuk mengetahui secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil t-test ini dapat dilihat lengkapnya pada output SPSS pada tabel.

Tabel Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
1 (Constant)	57.584	6.574		8.759	.001	1,000	1,000
Etika Komunikasi Publik	.134	.175	.120	.763	.450		

c. Dependent Variable: Citra Positif

Dalam ringkasan Tabel 4.3.5 hasil uji parsial (uji t), dihasilkan t-hitung motivasi t-hitung 40.763 > t-tabel 1.6839, artinya signifikan (df1 = 2 – 1 = 1 dan df2 = 42 – 2 = 40), disini berarti Hipotesis diterima. Artinya, karena t-hitung > t-tabel dan signifikan dibawah 0.05, maka dampak etika komunikasi publik pemerintah provinsi maluku berpengaruh terhadap citra positif.

c. Uji Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi dalam penelitian ini digunakan untuk menguji dampak etika komunikasi publik pemerintah provinsi maluku terhadap citra positif. Penyelesaian model regresi linier sederhana dilakukan dengan bantuan Program SPSS for Windows 28.0 dan perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.3.5, Persamaannya menunjukkan bahwa dampak etika komunikasi publik pemerintah provinsi maluku terhadap citra positif. Nilai konstanta sebesar 57,584 menyatakan jika ada dampak terhadap citra positif pemerintah provinsi maluku. Nilai koefisien etika komunikasi publik 0,134 menyatakan jika dampak etika komunikasi publik pemerintah provinsi maluku terhadap citra positif terjadi peningkatan sebesar 0.134.

d. Uji Koefisien Determinasi

Tabel Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			
					F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.120a	.401	.010	8.352	.582	1	2	.450

Harga koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh indikator, indikator etika komunikasi publik terhadap terhadap citra positif pemerintah Provinsi Maluku, dimana diketahui koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,401 atau 40,1%. Hal ini berarti bahwa dampak etika komunikasi publik terhadap citra positif pemerintah Provinsi Maluku sebesar 40,1%, sedangkan selebihnya yaitu 59,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel 4.3.7, ternyata variabel etika komunikasi publik (X) mempunyai koefisien sebesar 0,120 dan koefisien determinasi sebesar 40,1 terhadap citra positif pemerintah Provinsi Maluku (Y).

5. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak etika komunikasi publik terhadap citra positif pemerintah Provinsi Maluku, dan bertolak dari analisis serta hasil pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Etika komunikasi yang diukur melalui indikator pesan yang disampaikan, pesan yang diterima, pesan yang ditolak, serta sikap, watak dan sifat penerima pesan, menampakan pengaruh yang signifikan. (2) Berdasarkan uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa 40,1% pengaruh etika komunikasi publik terhadap citra positif pemerintah Provinsi Maluku, sedangkan selebihnya yaitu 59,9% dipengaruhi oleh indikator dan atau variabel lain. (3) Variabel Y yaitu citra positif pemerintah provinsi Maluku dengan indikator yakni Ide/gagasan, keyakinan, kesan dan obyek, dipengaruhi oleh variabel X, sehingga hasilnya, hipotesa diterima.

Daftar Pustaka

- Ahmadrswan Nasution, (2020), *Teknik Komunikasi Public Pelatihan Kepemimpinan Pegawai Angkatan II Bps Tahun 2020*, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Bps 2020.
- Ardianto, Elvinaro, dkk, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007), hlm. 68.
- Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi*, (Bandung: PT. Remajarosdakarya, 2005). Hlm. 134.
- Dennis Dijkzeul dan Markus Moke (2005), *komunikasi publik didefinisikan sebagai kegiatan dan strategi komunikasi yang ditujukan kepada khalayak sasaran*, 2005.
- Erliana Hasan (2005), *Komunikasi Pemerintah. Perilaku Komunikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Meningkatkan Profesionalitas Kerja*, Bandung: Revika Aditama, 2005.
- Eri Hariyanto, Widyaiswara, (2019), *Komunikasi Pemerintah Dan Efektivitas Kebijakan*.Pusdiklat Keuangan Umum BPPK.
- Gassing, S. dan S. (2016). *Public Relations*. CV. Andi Offset.
- Hafied Cangara, (2016), *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2016), h. 1.
- Kasmirus, W. (2013). Peran Kehumasan dalam Membangun Citra Pemerintah di Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Administrasi Reform*, 1(1), 190–208.

<https://eprints.umm.ac.id/35208/3/jiptumpp-gdl-dodiandrew-48980-3-babii.pdf>
<http://digilib.uinsby.ac.id/191/5/Bab%202.pdf>

- Rahmat Rahman Patty, (2020), *Gubernur Maluku Mengumpat Didepan Wartawan Tak Terima Soal Berita Renovasi Rumah Pakai APBD*. Kompas.com 23 Desember 2020.
- Rosady Ruslan, (2016), *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.68 -69.
- Ruslan, R. (2010). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi* (9th ed.). Rajawali Pers.
- Ruslan, Rosady. 2008. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persaja.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- (2017), *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- 2016, *Metodelogi Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 23. Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.